

Tabel Pemetaan Potensi Benturan Kepentingan

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

No	Unit Kerja / Bagian	Aktivitas / Tahapan Kegiatan	Potensi Benturan Kepentingan / Risiko	Penyebab Utama	Dampak Negatif	Rencana Tindak Pengendalian (Sesuai SK/SOP)
1	Bagian Perencanaan & Kepegawain	Pelaksanaan Kepegawain	Penyalahgunaan kewenangan terkait penempatan ASN	Intervensi pihak ketiga	Menurunnya profesionalitas ASN	Penempatan pegawai berdasarkan hasil <i>assessment</i> resmi oleh lembaga berkompeten.
		Perencanaan Kepegawain	Perencanaan kebutuhan pegawai tidak tepat	Data kepegawain tidak mutakhir/valid	Kinerja organisasi tidak optimal	Digitalisasi pengumpulan dokumen menggunakan <i>form online</i> yang dilengkapi <i>reminder</i> .
		Pelaksanaan Administrasi	Keterlambatan pembaruan data kepegawain	Pengumpulan data antar-Biro masih dilakukan secara	Layanan kepegawain internal menjadi terhambat	Penerapan sistem pengumpulan data digital yang

				manual	t	terintegrasi secara berkala.
		Perencanaan & Evaluasi Kinerja	Penyusunan dokumen perencanaan Setda terlambat	Pengumpulan data capaian kinerja antar-unit terlambat	Target kinerja biro tidak tercapai tepat waktu	Menyusun SOP dan Surat Edaran tegas mengenai batas waktu pengumpulan data beserta implikasinya.
2	Bagian Protokol	Pelaksanaan Acara / Kunjungan	Penempatan tamu tidak sesuai tata tempat keprotokolan	Informasi agenda pimpinan sering berubah mendadak dari eksternal	Jalannya acara tidak sesuai standar keprotokolan resmi	Menyusun dan menerapkan SOP Pelaksanaan Acara secara ketat dan berjenjang.
		Pelaksanaan Keprotokolan	Susunan acara (<i>rundown</i>) tidak sesuai ketentuan keprotokolan	Perubahan informasi yang tidak tersampaikan secara konsisten	Mengganggu kelancaran acara dan menurunkan wibawa birokrasi	Penyusunan SOP Pelaksanaan Acara serta konfirmasi berkala satu pintu sebelum acara dimulai.

		Perencanaan Fasilitas	Koordinasi persiapan kegiatan tidak optimal	Tidak adanya <i>contact person</i> yang jelas dari pemangku kepentingan	Kegiatan pimpinan tidak berjalan sesuai rencana semula	Standarisasi penunjukan <i>contact person</i> utama dalam SOP Pelaksanaan Acara.
		Administrasi Keuangan (Fungsi Melekat)	Penyalahgunaan kewenangan terkait administrasi keuangan	Pengendalian internal verifikasi anggaran belum optimal	Risiko kerugian keuangan daerah/negara	Penjadwalan serta pelaksanaan audit internal keuangan secara berkala.
3	Bagian Materi & Komunikasi Pimpinan	Perencanaan Materi	Substansi materi pimpinan tidak tepat	Kurangnya kualitas SDM/kompetensi dalam penyusunan substansi materi pimpinan	Informasi strategis tidak tersampaikan kepada pemangku kepentingan	Pelaksanaan Bimtek/ <i>coaching</i> penulisan materi serta pembuatan <i>bank</i> materi pimpinan.
		Pelaksanaan Penyusunan	Materi pimpinan tidak siap tepat waktu	Keterlambatan pengumpulan data/bahan materi dari OPD teknis	Agenda atau pidato pimpinan menjadi terganggu	Menyusun SOP Pelaksanaan Acara yang mengatur batas waktu pasokan

						data dari OPD.
		Pelaksanaan Publikasi	Keterlambatan publikasi berita kegiatan pimpinan	Proses produksi konten publikasi belum terstandar	Keterlambatan penyampaian informasi kegiatan daerah kepada publik	Menyusun batasan waktu publikasi yang jelas (maksimal H+1), alur kerja, dan <i>content calendar</i> .
		Pelaksanaan Informasi	Berita kegiatan pimpinan yang dipublikasikan tidak akurat	Keterbatasan dan keterlambatan konfirmasi dari narasumber terkait	Terjadinya kesalahan informasi di tengah masyarakat	Menyusun SOP penerbitan berita serta mekanisme <i>double check</i> ke narasumber resmi.
		Pertanggungjawaban / Reviu	Konten publikasi tidak sesuai kebijakan /arah komunikasi pimpinan	Reviu dan persetujuan konten belum berjalan secara berjenjang	Kesalahan persepsi publik terhadap figur pimpinan daerah	Menyusun SOP penerbitan konten dengan kewajiban paraf/reviu berjenjang sebelum tayang.